

REVOLUSI CYBERLAW INDONESIA

PEMBARUAN DAN REVISI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK 2016

Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M in IT Law, FCBArb.

		PERPUSTAKAAN	
No. INV	151/mhk/19/C-1		
Th. Angg	2019	Cat	C-1
PLN	<i>Em</i>	TGL	17/07/2019



DAFTAR ISI

Kata Sambutan I	v
Kata Sambutan II	vii
Kata Sambutan III	ix
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xv

BAB I	REVOLUSI CYBERLAW INDONESIA UNDANG-UNDANG	
	INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 2016	1
A.	Qua Vadis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008	1
B.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	4
C.	Legislasi Teknologi dan Keadilan Sosial	8
BAB II	URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN	
	TRANSAKSI ELEKTRONIK 2008.....	13
A.	Latar Belakang dan Dasar Pemikiran Revisi UU ITE 2008	13
1.	Maksud dan Tujuan Revisi UU ITE 2008	24
2.	Metode Penyusunan Naskah Akademik Revisi UU ITE 2008	24
B.	Asas-asas Dalam Penyusunan Norma Revisi UU ITE 2008	26
1.	Perumusan Tindak Pidana dan Sistem Pemidanaan	33
2.	Bentuk Pengaturan Proses Beracara yang Efektif Dalam Menerapkan Ketentuan UU ITE 2008	38
a.	Penegakan Hukum.....	38
b.	Prinsip Efektivitas	42
c.	Prinsip Pembebanan Tugas Kepada Penegak Hukum.....	45
3.	Bentuk Pengaturan yang Paling Tepat Terkait Pengakuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Baru	54

a. Belanda.....	55
b. Singapura.....	60
c. Malaysia.....	63
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Revisi UU ITE 2008	74
1. Pengaturan tentang Alat Bukti Elektronik	74
2. Konsistensi dan Ketepatan Penyebutan Istilah Sistem Elektronik.....	76
3. Penambahan Penjelasan Ketentuan tentang Intersepsi oleh Aparat Penegak Hukum dan Penghapusan Ketentuan Pengaturan Intersepsi dalam Peraturan Pemerintah (PP).....	77
4. Kewenangan Pengeledahan, Penyitaan, Penangkapan, dan Penahanan.....	77
5. Perubahan Redaksional Pasal 44 terkait Perubahan Ketentuan tentang Alat Bukti dalam Pasal 5.....	84
6. Ketentuan tentang Sanksi Pidana dalam Pasal 45 UU ITE.....	85

BAB III PILAR-PILAR NORMA CYBERLAW DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 2016	93
A. Historikal Pengundangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016	93
1. Kronologi Revisi UU ITE	94
2. Revisi UU ITE 2008 sebagai Perlindungan Hukum di Yurisdiksi Teritorial	96
B. Perubahan Terbatas Norma-Norma UU ITE 2008 Berdasarkan UU ITE 2016	98

BAB IV TEKNO-LEGISLASI DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA	113
A. Teori Hukum dan Legislasi Teknologi	113
B. Hukum, Legislasi dan Regulasi	117
C. Asas-Asas Tekno-Legislati.....	119
D. Kaidah dan Norma Tekno-Legislati	122
E. Institusionalisasi Tekno-Legislati.....	127

BAB V	REGULASI PERLINDUNGAN DATA DIGITAL DI ERA BIG DATA..	133
-------	--	-----

Daftar Pustaka	145
Glosarium	149
Indeks	153
Lampiran	159